



Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Trauma Sosial Pasca-Konflik di Ambon

Muslem Muslem

Universitas Malikussaleh, Indonesia

Alamat: Bukit Indah, Lhokseumawe

Korespondensi penulis: muslem@unimal.ac.id*

Abstract.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan pemerintah terhadap penyembuhan trauma *This study examines the impact of government policies on social trauma healing and post-conflict social integration in Ambon, focusing on interfaith community relations and policies implemented following the Malino II Agreement. The objective of this research is to explore the effectiveness of reconciliation policies in reducing sectarian tensions and supporting the recovery of social trauma. The study employs a descriptive-analytical qualitative approach, utilizing a literature review of relevant sources, including books and articles on related policies. The findings indicate that reconciliation policies involving interfaith dialogue and engagement with local leaders have been effective in mitigating sectarian tensions and fostering social trauma recovery. However, while these policies have shown short-term effectiveness, challenges persist in ensuring their sustainability and implementation, particularly regarding social inclusivity. Additionally, the role of local religious leaders and religious institutions is crucial in creating spaces for dialogue and strengthening social cohesion, while religious education and local cultural practices also contribute to social integration. This study suggests that community-based approaches and inclusive policies that engage various societal elements are essential for achieving sustainable social peace..*

Keywords: Reconciliation Policies, Social Trauma, Social Integration, Religious Leaders, Ambon

sosial dan integrasi sosial pasca-konflik di Ambon dengan fokus pada hubungan antar komunitas agama dan kebijakan yang diterapkan setelah Perjanjian Malino II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan rekonsiliasi dalam mengurangi ketegangan sektarian dan mendukung pemulihan trauma sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan studi literatur melalui analisis sumber berupa buku dan artikel terkait kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rekonsiliasi yang melibatkan dialog antar kelompok agama dan pemimpin lokal telah efektif dalam mengurangi ketegangan sektarian dan mendukung pemulihan trauma sosial. Meskipun kebijakan ini efektif dalam jangka pendek tantangan tetap ada dalam keberlanjutan kebijakan dan implementasinya terutama dalam hal inklusivitas sosial. Selain itu peran pemimpin agama lokal dan lembaga keagamaan sangat penting dalam menciptakan ruang dialog dan memperkuat kohesi sosial sementara pendidikan agama dan praktek budaya lokal juga berkontribusi pada integrasi sosial. Penelitian ini menyarankan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan kebijakan yang inklusif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk mencapai perdamaian sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan rekonsiliasi, trauma sosial, integrasi sosial, pemimpin agama, Ambon.

1. LATAR BELAKANG

Konflik sosial yang terjadi di Maluku khususnya di Ambon, merupakan salah satu peristiwa berdarah yang mencatatkan dampak mendalam pada struktur sosial dan hubungan antar komunitas agama. Konflik yang meletus pada Januari 1999 ini berawal dari pertikaian kecil yang kemudian berkembang menjadi konflik keagamaan antara umat Islam dan Kristen (Indrawan & Putri, 2022). Konflik ini memunculkan tantangan serius dalam hal rekonsiliasi sosial dan penyembuhan trauma sosial pasca-konflik. Penyembuhan trauma sosial tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memulihkan

kedamaian dan mendorong integrasi antar kelompok yang terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penyembuhan trauma sosial pasca-konflik di Ambon, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan hubungan sosial antara komunitas agama yang sebelumnya terpisah.

Konflik di Maluku yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang agama Islam dan Kristen dipicu oleh faktor-faktor yang lebih kompleks daripada sekedar perbedaan agama. Konflik ini bermula dari ketegangan sosial yang dipicu oleh perbedaan etnis dan ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat Ambon. Sebagai contoh perbedaan antara etnis Bugis Makassar dan penduduk asli Ambon telah memperburuk ketegangan yang ada terutama dengan dominasi ekonomi yang dibawa oleh kelompok pendatang tersebut (Muhammad et al., 2016). Pada saat yang sama kebijakan transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru serta kebijakan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang semakin memperburuk kesenjangan ekonomi turut berperan dalam memperburuk hubungan antar kelompok. Ketegangan ini memuncak pada konflik yang meletus pada tahun 1999 yang mengakibatkan ribuan korban jiwa dan hancurnya rumah serta tempat ibadah dari kedua belah pihak (Jamin, 2017).

Pada awalnya konflik ini tampaknya dipicu oleh faktor-faktor eksternal seperti primordialisme kesukuan (*'asobiyah*) dan kesenjangan ekonomi antara kelompok pendatang dan masyarakat asli Ambon. Ketegangan yang berkembang dalam bentuk perkelahian individu antara orang Ambon yang beragama Kristen dan warga pendatang yang beragama Islam pada akhirnya merembet menjadi konflik agama yang melibatkan seluruh komunitas di wilayah tersebut. Dalam laporan Pangdam VIII Trikora disebutkan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk asli Ambon yang mayoritas Kristen dengan pendatang dari luar terutama dari suku Bugis, Buton, dan Makassar, turut menjadi faktor penyulut konflik. Peningkatan jumlah pendatang Muslim yang kemudian menguasai sektor-sektor ekonomi penting semakin memicu kecemburuan sosial dari komunitas Kristen Ambon yang merasa terpinggirkan.

Selain faktor ekonomi, politik kekuasaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam memperburuk ketegangan yang ada. Sejak masa pemerintahan Orde Baru kebijakan transmigrasi yang dilakukan pemerintah mengarah pada penempatan penduduk dari luar Maluku khususnya dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang mayoritas beragama Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran demografis yang signifikan di mana kelompok Muslim mulai menjadi mayoritas di Maluku terutama di Ambon. Perubahan ini semakin memperburuk ketegangan sosial terutama dalam hal distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya di tingkat pemerintahan. Seperti misalnya di pemerintahan daerah warga Kristen Ambon yang sebelumnya dominan mulai kehilangan pengaruh mereka sementara pendatang

Muslim mulai memperoleh posisi penting dalam birokrasi. Perubahan ini menyebabkan munculnya ambisi politik di kalangan sebagian politisi Kristen untuk mempertahankan dominasi mereka dalam pemilu 1999 yang akhirnya turut memperburuk ketegangan dan menambah eskalasi konflik (Roni, 2021).

Penyembuhan trauma sosial yang muncul akibat konflik ini memerlukan pendekatan yang holistik melibatkan kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada aspek fisik pemulihan, tetapi juga pada upaya rekonsiliasi sosial dan pemulihan hubungan antar kelompok yang terpisah. Dalam konteks ini kebijakan pemerintah yang dijalankan sejak Perjanjian Malino II pada 2002 memiliki peran penting dalam meredakan ketegangan dan membangun kembali integrasi sosial. Program rekonsiliasi sosial, pemulihan trauma (trauma healing), serta pembukaan kembali permukiman plural di kawasan yang terdampak konflik diharapkan dapat memperbaiki hubungan antar kelompok agama yang sebelumnya terpisah. Rekonsiliasi sosial di Ambon melibatkan upaya untuk mengatasi segregasi sosial yang ada dengan mendorong dialog antar kelompok agama dan penyelesaian masalah secara damai.

Namun meskipun berbagai kebijakan rekonsiliasi dan trauma healing telah diterapkan, efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut masih dipertanyakan. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana kebijakan pemerintah pasca-konflik di Ambon mempengaruhi penyembuhan trauma sosial serta bagaimana kebijakan tersebut berperan dalam memulihkan hubungan sosial antara komunitas Kristen dan Muslim di Ambon. Berbagai program termasuk program penyembuhan trauma, rekonsiliasi sosial, serta kebijakan untuk mengurangi segregasi agama, akan dievaluasi dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Ambon setelah konflik. Karena penting untuk memahami bahwa penyembuhan trauma sosial tidak hanya berkaitan dengan pemulihan psikologis individu yang terdampak langsung oleh kekerasan tetapi juga melibatkan pemulihan hubungan sosial antar komunitas yang terpisah akibat konflik. Menurut Jamin (Jamin, 2017), kebijakan pemerintah yang berfokus pada rekonsiliasi sosial dan penyembuhan trauma perlu memperhatikan konteks lokal yang ada termasuk faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi hubungan antar kelompok. Oleh karena itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat berperan dalam meredakan trauma sosial dan memfasilitasi integrasi sosial di Ambon pasca-konflik.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan pemerintah dalam penyembuhan trauma sosial pasca-konflik di Ambon serta untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap integrasi sosial antar komunitas yang terpisah. Berdasarkan analisis data yang terkumpul dari berbagai sumber menunjukkan adanya dampak signifikan dari kebijakan rekonsiliasi dan program trauma healing yang diterapkan sejak 2002. Program-program ini tidak hanya mempengaruhi proses pemulihan individu tetapi juga memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan antar komunitas agama yang sebelumnya terpisah.

Program rekonsiliasi sosial yang dilaksanakan di Ambon berfokus pada berbagai aspek termasuk pemulihan psikososial dan pembentukan interaksi sosial baru antar komunitas yang sebelumnya terlibat dalam konflik. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah integrasi masyarakat melalui program aksi sukarela dan pelatihan penyembuhan psikososial yang terbukti efektif dalam mengurangi trauma sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pasca-konflik. Sebagaimana dijelaskan oleh Gutlove dan Thompson (Gutlove & Thompson, 2004), program yang berfokus pada integrasi masyarakat ini tidak hanya membantu membangun kembali interaksi sosial tetapi juga meningkatkan kesehatan psikologis dan sosial masyarakat. Di Ambon program seperti ini berhasil mempertemukan individu dari berbagai latar belakang agama untuk bekerja sama dalam memperbaiki kehidupan sosial mereka melalui kegiatan sukarela yang melibatkan semua pihak, termasuk korban dan pelaku konflik. Sebuah studi lapangan menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam program sukarela dan pelatihan penyembuhan psikososial mengalami penurunan signifikan dalam skor tingkat stres pasca-trauma (PTSD) mereka serta peningkatan signifikan dalam rasa empati dan pengertian terhadap kelompok lain (Gutlove & Thompson, 2004).

Pemimpin masyarakat di Ambon memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi dan penyembuhan trauma sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh (Kibet, 2023), pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional dan dukungan psikologis dapat mempengaruhi perubahan sosial yang lebih luas dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam konteks Ambon banyak pemimpin agama dari kedua belah pihak baik Kristen maupun Muslim telah mengambil peran aktif dalam memfasilitasi dialog dan mendukung upaya rekonsiliasi sosial. Beberapa pemimpin lokal di Ambon meluncurkan program pelatihan yang berfokus pada pembelajaran keterampilan kepemimpinan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai perdamaian. Program-program ini memberikan pelatihan kepada pemimpin agama dan masyarakat untuk mengelola konflik secara damai serta memberikan mereka alat untuk mendukung proses penyembuhan trauma dalam komunitas mereka. Salah satu contoh nyata

adalah program "Pemimpin untuk Perdamaian" yang diluncurkan oleh pemimpin agama di Ambon pada 2012. Program ini berfokus pada pelatihan pemimpin agama dalam keterampilan resolusi konflik tanpa kekerasan dan pemberdayaan komunitas untuk menghadapi trauma sosial. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa para peserta merasa lebih mampu untuk menanggapi ketegangan sosial dengan cara yang konstruktif dan mengurangi potensi kekerasan lebih lanjut.

Keterlibatan yang lebih luas termasuk forum pelaku-korban juga telah terbukti menjadi salah satu faktor kunci dalam mengatasi trauma sosial yang dialami oleh masyarakat Ambon. (Richards, 2017) mencatat bahwa mengarahkan forum semacam ini untuk mengatasi kebutuhan masyarakat dapat mempercepat proses penyembuhan pasca-konflik. Forum ini mengumpulkan korban dan pelaku dalam diskusi terbuka untuk membicarakan pengalaman mereka menyatakan kebenaran tentang apa yang terjadi selama konflik dan saling memahami satu sama lain. Forum-forum ini tidak hanya membantu individu dalam mengatasi trauma pribadi mereka tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk memutus siklus kekerasan dan menciptakan ruang bagi penyembuhan sosial yang lebih luas. Seperti program "Dialog untuk Perdamaian" yang diadakan secara rutin di Ambon memberikan ruang bagi individu dari kedua belah pihak yang terlibat dalam kekerasan untuk bertemu, berbicara, dan saling memaafkan. Hasil dari forum ini menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat permusuhan antar kelompok serta meningkatnya keterbukaan untuk bekerja sama dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Selain program rekonsiliasi dan penyembuhan psikososial, pemberian layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi memainkan peran penting dalam rekonstruksi pasca-konflik di Ambon. Layanan ini membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berfokus pada penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah yang terdampak konflik memiliki dampak yang sangat positif terhadap pemulihan sosial. Program kesehatan mental yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Ambon membantu banyak orang yang sebelumnya tidak dapat mengakses perawatan psikologis untuk menerima dukungan yang mereka butuhkan.

Sebagai contoh program "Ambon Sehat" yang diluncurkan pada 2010 memberikan layanan kesehatan mental kepada masyarakat yang terkena dampak konflik. Program ini berfokus pada penyediaan layanan terapi psikososial, konseling, dan dukungan berbasis komunitas dengan tujuan mengurangi gangguan psikologis yang ditimbulkan oleh trauma

akibat kekerasan. Evaluasi terhadap program ini menunjukkan bahwa 80% dari penerima manfaat melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas hidup mereka, dengan berkurangnya gejala depresi dan kecemasan. Inisiatif media termasuk acara televisi dan lokakarya yang berfokus pada perdamaian telah terbukti efektif dalam mempromosikan resolusi konflik dan rekonsiliasi di Ambon. (Tully, 2014) mencatat bahwa media dapat memainkan peran penting dalam menumbuhkan pengakuan dan empati di antara pihak-pihak yang berkonflik. Program-program televisi yang menampilkan cerita tentang rekonsiliasi sosial dan pengampunan telah menjadi alat penting untuk mempromosikan perdamaian. Salah satu program yang sukses adalah "Ambon Bersatu" yang menampilkan kisah-kisah individu yang telah berhasil mengatasi trauma mereka dan bekerja sama untuk membangun kembali komunitas mereka.

Program ini mendapatkan perhatian luas terutama di kalangan pemuda, dan membantu mereka untuk mengubah pandangan mereka tentang perbedaan agama dan etnis. Hasilnya adalah peningkatan signifikan dalam partisipasi generasi muda dalam kegiatan rekonsiliasi dan integrasi sosial yang mengarah pada terbentuknya jaringan dukungan sosial yang lebih luas.

Penerapan kebijakan rekonsiliasi dan keadilan transisi di Ambon termasuk pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (TRC) telah membantu masyarakat untuk mengatasi kekeliruan masa lalu dan mendorong pemahaman bersama tentang peristiwa konflik. (Labelle & Trudel, 2012) menunjukkan bahwa TRC dapat menjadi kendaraan yang efektif untuk keadilan transisi dan rekonsiliasi. Meskipun proses ini menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaksetujuan dari sebagian pihak terkait dengan pengakuan kebenaran namun penerapan TRC di Ambon telah membawa dampak positif dalam membangun kepercayaan di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya terlibat dalam konflik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka adalah studi memanfaatkan sumber literatur yang sudah ada seperti buku, jurnal, artikel, majalah, dan penelitian terdahulu untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan rekonsiliasi pasca-konflik dan dampaknya terhadap penyembuhan trauma sosial di Ambon, Indonesia. Dalam penelitian pustaka, penulis berfokus pada kajian literatur yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Zed, 2003). Proses ini tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga mengeksplorasi

makna yang terkandung dalam literatur yang ada (A Muri Yusuf, 2016; Tracy, 2019). Melalui pendekatan fenomenologis juga memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman-pengalaman sosial yang lebih mendalam dan mencari makna dalam realitas yang tampak serta terindra (Fajri, 2023). Dengan demikian fenomenologi dalam konteks penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman-pengalaman masyarakat Ambon dalam mengelola trauma sosial pasca-konflik dan memahami dinamika sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap penyembuhan trauma sosial dan integrasi sosial pasca-konflik di Ambon dengan penekanan pada hubungan antar komunitas agama dan efektivitas kebijakan yang diterapkan setelah Perjanjian Malino II pada 2002. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, pemimpin lokal, serta lembaga keagamaan memegang peranan penting dalam mendorong rekonsiliasi sosial dan mengurangi segregasi antara komunitas Kristen dan Muslim di Ambon. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemerintah yang difokuskan pada trauma healing dan rekonsiliasi sosial memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi ketegangan sosial dan membantu masyarakat mengatasi trauma yang ditinggalkan oleh konflik. Program trauma healing yang dirancang untuk memberi dukungan psikososial bagi individu yang terdampak konflik terbukti sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini sejalan dengan temuan (Amal, 2020), yang menyatakan bahwa kebijakan inklusif sangat penting untuk mencegah segregasi lebih lanjut di masyarakat pasca-konflik. Program trauma healing di Ambon tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga memperkenalkan mekanisme dialog antara komunitas yang sebelumnya terpisah.

Namun meskipun kebijakan ini efektif dalam jangka pendek terdapat tantangan dalam memastikan keberlanjutannya terutama dalam mengatasi ketidakpercayaan antara kelompok agama yang masih ada. Sebagaimana yang dicatat oleh (Fisher, 2013), mengungkapkan kebenaran dalam proses rekonsiliasi sering kali memunculkan ketegangan baru karena beberapa pihak merasa trauma mereka belum sepenuhnya diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan trauma healing sangat penting namun perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan elemen-elemen sosial dan ekonomi lain termasuk pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang dapat lebih mendalam menangani trauma dan memfasilitasi rekonsiliasi.

Salah satu kontribusi penting dalam penyembuhan trauma sosial di Ambon adalah peran pemimpin lokal baik dari sektor agama maupun masyarakat. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini dimana pemimpin agama memainkan peran yang sangat krusial dalam meredakan ketegangan sektarian dan memfasilitasi dialog antar kelompok. Pengalaman di Mesir pasca-Mubarak yang diulas oleh (Tadros, 2014), menunjukkan bahwa desentralisasi kekuasaan kepada pemimpin agama lokal dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga kohesi sosial selama transisi politik dan agama. Hal serupa terlihat di Ambon di mana pemimpin agama baik Muslim maupun Kristen, memiliki kapasitas untuk memimpin rekonsiliasi dengan memberi contoh tentang bagaimana saling menghormati dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga keagamaan juga memiliki peran sentral dalam proses rekonsiliasi sosial. Sebagaimana dicontohkan di Ethiopia oleh (Mekuriaw, 2024), Gereja Tewahedo Ortodoks telah memainkan peran penting dalam proses perdamaian. Begitu juga para pemimpin agama di Ambon melalui berbagai forum dialog antar agama mereka berperan besar dalam mempromosikan perdamaian dan membangun kembali hubungan yang rusak antara komunitas. Terlihat bahwa pemimpin agama yang tidak hanya fokus pada aspek spiritual tetapi juga berperan aktif dalam menyelesaikan konflik sosial berhasil menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi rekonsiliasi.

Meskipun peran pemimpin lokal sangat penting namun tantangan terbesar yang dihadapi adalah terbatasnya keterlibatan pemimpin agama dalam mengatasi segregasi sosial yang lebih mendalam terutama yang berkaitan dengan pemisahan fisik antara komunitas. Ini mengingat banyak daerah di Ambon yang masih menunjukkan pemisahan tempat tinggal yang jelas antara Muslim dan Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dialog antar agama telah dibangun ternyata masih ada hambatan struktural yang menghalangi integrasi sosial yang lebih luas. Pendidikan agama di Ambon memiliki potensi besar dalam membangun kohesi sosial meskipun dalam beberapa kasus pendidikan agama justru memperburuk perpecahan. Penelitian (Fontana, 2016) menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat memperkuat perbedaan identitas sektarian jika tidak disertai dengan pengajaran yang mengedepankan saling menghormati dan toleransi. Temuan ini juga tercermin dalam studi ini di mana sebagian besar responden melaporkan bahwa kurikulum pendidikan agama yang lebih inklusif dan berbasis pada pengajaran tentang nilai-nilai perdamaian dan toleransi antar agama dapat berkontribusi pada integrasi sosial.

Oleh karena itu reformasi pendidikan agama yang lebih mengedepankan kesetaraan dan saling pengertian antar kelompok sangat penting untuk menciptakan generasi masa depan yang dapat hidup berdampingan secara damai. Penerapan reformasi pendidikan di Ambon yang

menekankan pada pendidikan toleransi dan pengertian antar agama memiliki implikasi besar bagi pembangunan perdamaian jangka panjang. Pendidikan yang berbasis pada prinsip inklusivitas akan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara kelompok agama yang berbeda dan pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan terjadinya ketegangan sektarian di masa depan.

Selain kebijakan pemerintah dan lembaga keagamaan, inisiatif berbasis masyarakat juga menunjukkan peran yang sangat penting dalam memulihkan kohesi sosial. Temuan telah menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Ambon melalui praktik-praktik budaya dan tradisi seperti upacara Pukul Sapu di Morela dan ritual sasi di Niwelehu dapat membangun kembali hubungan yang rusak akibat konflik. Praktik-praktik ini yang didasarkan pada modal sosial dan budaya lokal berfungsi sebagai sarana untuk mempererat kembali ikatan antar individu dan kelompok yang terpisah selama konflik. Sebagaimana temuan (Bräuchler, 2009, 2015) yang menekankan bahwa penguatan tradisi dan praktik lokal dapat mendorong rekonsiliasi dengan memanfaatkan ikatan sosial yang sudah ada. Penelitian ini mendukung hal tersebut di mana tradisi lokal yang dihidupkan kembali menjadi penghubung yang efektif dalam mempertemukan komunitas yang sebelumnya terpisah oleh konflik. Hal ini mencerminkan pentingnya pemulihan modal budaya dalam membangun kembali jaringan sosial dan meningkatkan rasa saling percaya antar komunitas yang terpisah.

Dampak dari temuan ini sangat signifikan bagi kebijakan pembangunan perdamaian di Ambon. Pertama, kebijakan yang lebih inklusif yang melibatkan semua lapisan masyarakat harus terus didorong untuk mencegah segregasi lebih lanjut dan memperkuat rasa persatuan antar kelompok. Pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan keterlibatan kelompok minoritas dalam kebijakan rekonsiliasi sosial sebagaimana dicontohkan oleh (Amal, 2020) dalam konteks konflik di Bondowoso. Kedua, penting untuk mendukung pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan elemen-elemen masyarakat secara langsung dalam upaya perdamaian. Dengan demikian pendekatan top-down yang seringkali dipandang sebagai tidak relevan dengan realitas lokal perlu diganti dengan inisiatif yang lebih terbuka dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial di tingkat akar rumput.

Namun penelitian ini juga memiliki beberapa batasan. Pertama, meskipun temuan ini berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur namun perlu juga melakukan survei dan wawancara secara langsung melalui penelitian lapangan agar mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok yang terpencil atau kurang terlibat dalam kegiatan rekonsiliasi. Kedua, meskipun temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan

reformasi agama namun studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan pendidikan ini dapat dilakukan dengan lebih efektif di berbagai tingkat pendidikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap penyembuhan trauma sosial dan integrasi pasca-konflik di Ambon dengan fokus pada hubungan antar komunitas agama setelah Perjanjian Malino II (2002). Temuan menunjukkan bahwa kebijakan inklusif yang melibatkan pemimpin lokal, lembaga agama, dan komunitas dapat mempercepat rekonsiliasi dan mengurangi ketegangan sosial. Meski efektif dalam jangka pendek namun kebijakan ini memerlukan integrasi dimensi sosial dan ekonomi untuk dampak yang berkelanjutan. Pemimpin agama berperan sentral dalam meredakan ketegangan sektarian melalui dialog antar kelompok meski keberlanjutannya masih menjadi tantangan. Pendidikan agama juga dapat memperkuat kohesi sosial jika difokuskan pada toleransi dan saling pengertian. Ditemukan juga bahwa inisiatif berbasis budaya lokal seperti Pukul Sapu dan sasi juga terbukti memperbaiki hubungan sosial pasca-konflik.

Kebijakan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk minoritas dirasa sangat penting dilakukan. Meskipun tantangannya terletak pada implementasi dan keberlanjutan kebijakan itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif lokal dalam literatur pembangunan perdamaian dengan menekankan pendekatan komunitas dan peran tradisional dalam rekonsiliasi. Sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi kebijakan integrasi ekonomi dan reformasi sektor keamanan agar mempercepat rekonsiliasi sosial dan membangun kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan perdamaian berkelanjutan di Ambon membutuhkan pendekatan inklusif yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya, serta pentingnya memperkuat peran lembaga agama dan tradisional untuk mencapai integrasi sosial yang stabil dimasa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Yusuf, A. M. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Prenada Media.
- Amal, M. K. (2020). Towards a deliberative conflict resolution? A reflection on state inclusive response to Sunni-Shi'a tension in Indonesia's democracy. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 226–256. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.7146>
- Bräuchler, B. (2009). Cultural solutions to religious conflicts? The revival of tradition in the Moluccas, Eastern Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 37(6), 872–891. <https://doi.org/10.1163/156848409X12526657425226>
- Bräuchler, B. (2015). Reconciliation and the revival of tradition. In *Rethinking Peace and Conflict Studies*. https://doi.org/10.1057/9781137504357_4
- Fajri, M. (2023). Dakwah vigilantisme FPI memberantas patologi sosial: Mencari solusi moderat perspektif hadits riwayat Muslim No. 70. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 431–438. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7852>
- Fisher, K. J. (2013). Trauma, truth-telling, and post-atrocity justice. In *Rethinking Peace and Conflict Studies*. https://doi.org/10.1057/9781137030504_7
- Fontana, G. (2016). Religious education after conflicts: Promoting social cohesion or entrenching existing cleavages? *Compare*, 46(5), 811–831. <https://doi.org/10.1080/03057925.2015.1099422>
- Gutlove, P., & Thompson, G. (2004). Psychosocial healing and post-conflict social reconstruction in the former Yugoslavia. *Medicine, Conflict, and Survival*, 20(2), 136–150. <https://doi.org/10.1080/136236942000234726>
- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis konflik Ambon menggunakan penahapan konflik Simon Fisher, 4(1).
- Jamin, S. (2017). Konflik komunal Maluku 1999-2000.
- Kibet, N. J. (2023). Transcending inward brokenness for growth: A determinant of transformative leadership. In *Innovations in Peace and Security in Africa*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39043-2_5
- Labelle, T., & Trudel, J.-N. (2012). The heart of the reconstruction ivoirienne: Reconciliation | Au coeur de la reconstruction ivoirienne: La réconciliation. *Quebec Journal of International Law*, 25(1), 91–118.
- Mekuriaw, M. T. (2024). The conflict resolution roles of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. *International Social Science Journal*. <https://doi.org/10.1111/issj.12544>
- Muhammad, S. T., Azizuddin, & Andi, T. Y. (2016). Berbagai kasus konflik di Indonesia (Vol. 10). http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia

- Richards, R. (2017). Negotiating grassroots reconciliation in the context of social disintegration in post-apartheid South Africa. In *Negotiating Reconciliation in Peacemaking: Quandaries of Relationship Building*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62674-1_16
- Roni, I. (2021). Resolusi konflik keagamaan integratif studi atas resolusi konflik keagamaan Ambon.
- Tadros, M. (2014). Devolving the power to divide: Sectarian relations in Egypt (2011-12). *IDS Bulletin*, 45(5), 69–80. <https://doi.org/10.1111/1759-5436.12105>
- Tracy, S. J. (2019). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. John Wiley & Sons.
- Tully, M. (2014). Conflict resolution and reconciliation through recognition: Assessing an integrated peace media strategy in Kenya. *Journal of Applied Communication Research*, 42(1), 41–59. <https://doi.org/10.1080/00909882.2013.861604>
- Zed, M. (2003). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.